

KINERJA BINTARA PEMBINA DESA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI DESA LAMBARA KECAMATAN TANAMBULAVA KABUPATEN SIGI

Nova Gloria Sampingan^{1*}, Nurziah²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

14-06-2026

Disetujui:

28-07-2026

Dipublikasi:

02-08-2026

Kata Kunci:

*Kinerja; Babinsa;
Keamanan Masyarakat;
Ketertiban Desa;
Pembinaan Teritorial*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan unsur Koramil, Babinsa, pemerintah desa, BPD, Bhabinkamtibmas, dan Linmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berada pada kategori cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan enam indikator kinerja Bernardin dan Russell, Babinsa menunjukkan kinerja yang baik pada aspek kualitas kerja, ketepatan waktu, dan efektivitas penggunaan sumber daya melalui kemampuan merespons persoalan masyarakat, menjalankan pembinaan wilayah, serta membangun koordinasi dengan pemerintah desa dan unsur masyarakat. Namun, aspek kuantitas kerja, kehadiran, dan dampak interpersonal masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan kehadiran fisik secara rutin akibat adanya tugas kewilayahan lainnya. Faktor pendukung kinerja Babinsa meliputi pemahaman terhadap tugas, kedisiplinan, komitmen kerja, serta dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat berasal dari beban tugas tambahan, keterbatasan waktu, serta belum optimalnya intensitas komunikasi langsung dengan seluruh lapisan masyarakat.

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki dinamika sosial yang kompleks, sehingga membutuhkan kapasitas kelembagaan dan kehadiran aktor keamanan yang mampu membangun hubungan kolaboratif dengan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, salah satu unsur yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah desa adalah Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai aparat kewilayahan TNI Angkatan Darat yang menjalankan fungsi pembinaan teritorial, komunikasi sosial, serta deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.

Perubahan lingkungan sosial masyarakat yang semakin dinamis menyebabkan tugas aparat keamanan tidak lagi hanya berorientasi pada pendekatan pengamanan secara formal, tetapi juga

membutuhkan kemampuan membangun kepercayaan, koordinasi, dan hubungan sosial dengan berbagai pemangku kepentingan lokal. Pendekatan keamanan berbasis masyarakat (community-based security) menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial, sehingga efektivitas aparat keamanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun jejaring dan kerja sama di tingkat lokal.

Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas kinerja individu yang menjalankan fungsi organisasi tersebut. Kinerja aparatur menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana organisasi publik mampu mencapai tujuan pelayanan dan pelaksanaan tugasnya. Bernardin & Russell (1993) menjelaskan bahwa kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, seperti kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas penggunaan sumber daya, kehadiran, dan kemampuan membangun hubungan interpersonal.

Kajian mengenai kinerja organisasi publik menunjukkan bahwa faktor internal organisasi maupun kemampuan individu memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan institusi. Brewer & Selden (2000) melalui penelitian mengenai kinerja organisasi sektor publik menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi pemerintah dipengaruhi oleh kapasitas individu, lingkungan organisasi, serta kemampuan membangun sistem kerja yang mendukung pencapaian tujuan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kinerja aparatur tidak cukup hanya melihat hasil akhir pekerjaan, tetapi juga perlu memahami proses dan perilaku kerja yang mendukung pencapaian tersebut.

Selanjutnya, Moynihan & Pandey (2005) menegaskan bahwa kinerja organisasi publik dipengaruhi oleh praktik manajemen, kapasitas organisasi, serta kemampuan aparatur dalam memahami tujuan organisasi. Dalam konteks tugas Babinsa, kemampuan menerjemahkan tujuan pembinaan teritorial ke dalam tindakan nyata di masyarakat menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas. Babinsa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis keamanan, tetapi juga kemampuan komunikasi sosial dan koordinasi lintas sektor.

Penelitian Andrews et al. (2006) juga menunjukkan bahwa strategi organisasi memiliki hubungan dengan pencapaian kinerja sektor publik. Organisasi publik yang mampu menyesuaikan strategi kerja dengan karakteristik lingkungan cenderung memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik. Hal ini relevan dengan tugas Babinsa yang berada pada lingkungan desa dengan karakter sosial, budaya, dan tingkat kerawanan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan pola pendekatan yang adaptif sesuai kondisi wilayah binaannya.

Selain itu, Kim (2005) menjelaskan bahwa faktor individu seperti komitmen organisasi, motivasi kerja, dan hubungan interpersonal memiliki kontribusi terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan aparat publik tidak hanya bergantung pada struktur organisasi, tetapi juga pada kemampuan individu membangun relasi kerja dan kepercayaan dengan lingkungan sosialnya.

Meskipun kajian mengenai kinerja aparatur publik telah banyak dilakukan, penelitian mengenai kinerja aparat kewilayahan dalam konteks keamanan desa masih relatif terbatas, terutama yang melihat praktik kerja Babinsa dari perspektif masyarakat dan pemerintah desa sebagai penerima manfaat langsung. Padahal, keberhasilan pembinaan teritorial sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam mengintegrasikan pendekatan keamanan dengan pendekatan sosial kemasyarakatan.

Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah yang membutuhkan peran aktif aparat kewilayahan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Babinsa menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kehadiran fisik akibat tuntutan tugas lain, kebutuhan koordinasi dengan berbagai unsur pemerintahan desa, serta pentingnya membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi berdasarkan enam indikator kinerja menurut Bernardin & Russell (1993), yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas penggunaan sumber daya, kehadiran, dan dampak interpersonal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial pada tingkat desa sekaligus menjadi masukan bagi penguatan kinerja aparat kewilayahan dalam mendukung keamanan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kinerja Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggambarkan fenomena kinerja Babinsa berdasarkan pengalaman, persepsi, serta praktik pelaksanaan tugas di lingkungan sosial masyarakat secara alamiah.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Babinsa memiliki peran strategis dalam pembinaan teritorial dan pemeliharaan stabilitas keamanan wilayah desa, terutama dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat yang membutuhkan kehadiran aparat kewilayahan.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan tugas Babinsa. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Danramil, Bati Tuud, Babinsa Desa Lambara, Kepala Desa, Seksi Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bhabinkamtibmas, serta anggota Linmas.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi yang meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas Babinsa dalam menjalankan tugas pembinaan wilayah. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai kinerja Babinsa berdasarkan enam indikator kinerja menurut Bernardin & Russell (1993), yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas penggunaan sumber daya, kehadiran, dan dampak interpersonal. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa laporan kegiatan, arsip pemerintahan desa, serta dokumentasi aktivitas lapangan.

Data penelitian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman (1992), yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, informasi hasil wawancara dan observasi dipilih berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian tematik berdasarkan indikator kinerja. Tahap akhir dilakukan melalui proses interpretasi dan verifikasi untuk memperoleh kesimpulan mengenai kinerja Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Lambara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kinerja Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Lambara secara umum berada pada kategori cukup baik. Analisis dilakukan berdasarkan enam indikator kinerja menurut Bernardin & Russell (1993), yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas penggunaan sumber daya, kehadiran, dan dampak interpersonal.

Kualitas Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kualitas kerja Babinsa Desa Lambara menunjukkan kondisi yang cukup baik. Babinsa dinilai memiliki kemampuan dalam merespons

berbagai persoalan keamanan maupun dinamika sosial masyarakat secara cepat dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan tugas.

Menurut Bernardin & Russell (1993), kualitas kerja menggambarkan tingkat kesesuaian hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan organisasi. Dalam konteks tugas Babinsa, kemampuan mendeteksi permasalahan, memberikan respons awal, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan unsur keamanan lainnya menunjukkan adanya kompetensi dalam menjalankan fungsi pembinaan wilayah.

Temuan ini sejalan dengan Mustafa (2008) yang menjelaskan bahwa kinerja aparatur publik tidak hanya dilihat dari penyelesaian tugas administratif, tetapi juga dari kemampuan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, Saputra (2003) menegaskan bahwa pembinaan teritorial menuntut aparat kewilayahan memiliki kemampuan melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.

Dengan demikian, kualitas kerja Babinsa Desa Lambara dapat dikategorikan baik karena mampu menjalankan fungsi pengamanan dan pembinaan masyarakat secara responsif.

Kuantitas Kerja

Pada aspek kuantitas kerja, Babinsa Desa Lambara menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup tinggi dalam kegiatan formal pemerintahan desa maupun agenda koordinasi keamanan. Namun, keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat yang bersifat spontan, seperti kerja bakti dan gotong royong warga, masih belum berlangsung secara optimal.

Bernardin & Russell (1993) menjelaskan bahwa kuantitas kerja berkaitan dengan jumlah hasil pekerjaan atau frekuensi aktivitas yang mampu diselesaikan dalam periode tertentu. Keterbatasan kehadiran dalam kegiatan sosial tertentu menunjukkan bahwa jumlah aktivitas yang dilakukan Babinsa tidak selalu merata pada seluruh bentuk kegiatan masyarakat.

Menurut Wibowo (2016), kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang bersifat prioritas dan beragam. Dalam konteks Babinsa, pelaksanaan tugas tidak hanya berfokus pada satu desa binaan, tetapi juga mencakup kegiatan koordinasi, pelaporan, serta tugas kewilayahan lainnya.

Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu menunjukkan hasil yang positif. Informan menyampaikan bahwa Babinsa selalu hadir sesuai jadwal dalam kegiatan koordinasi pemerintahan desa dan mampu memberikan respons cepat ketika menerima laporan mengenai permasalahan masyarakat.

Bernardin & Russell (1993) menyatakan bahwa ketepatan waktu mencerminkan kemampuan individu menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan adanya kedisiplinan dan komitmen dalam menjalankan tugas.

Temuan ini diperkuat oleh Sedarmayanti (2016) yang menjelaskan bahwa disiplin waktu merupakan salah satu indikator profesionalitas aparatur. Dalam pelaksanaan tugas kewilayahan, ketepatan respons Babinsa menjadi faktor penting dalam mencegah berkembangnya gangguan keamanan menjadi konflik yang lebih besar.

Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Babinsa cukup efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Keterbatasan sarana operasional tidak menjadi hambatan utama karena Babinsa mampu membangun kerja sama dengan pemerintah desa, Linmas, serta unsur masyarakat lainnya.

Menurut Bernardin & Russell (1993), efektivitas penggunaan sumber daya berkaitan dengan kemampuan individu memanfaatkan berbagai fasilitas dan dukungan yang tersedia untuk mencapai hasil kerja optimal. Strategi pelibatan masyarakat menunjukkan bahwa Babinsa tidak hanya mengandalkan kemampuan internal, tetapi juga membangun jaringan sosial sebagai bagian dari pembinaan wilayah.

Hal tersebut sejalan dengan konsep tata kelola kolaboratif yang menempatkan pemerintah dan masyarakat sebagai mitra dalam penyelesaian persoalan publik (Mustafa, 2008). Dalam

konteks keamanan desa, sinergi antara Babinsa, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas wilayah.

Kehadiran

Pada indikator kehadiran, ditemukan bahwa keberadaan fisik Babinsa di Desa Lambara belum berlangsung setiap hari secara rutin. Kondisi ini disebabkan oleh adanya berbagai tugas tambahan, seperti apel di Koramil, kegiatan strong point, serta penyelesaian administrasi kewilayahan.

Bernardin & Russell (1993) menjelaskan bahwa kehadiran merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kedisiplinan dan keteraturan individu dalam menjalankan kewajibannya. Meskipun kehadiran fisik harian belum optimal, Babinsa tetap menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan tugas utama di wilayah binaannya.

Menurut Mathis & Jackson (2006), kondisi pekerjaan dengan tanggung jawab yang bersifat multidimensi dapat memengaruhi tingkat keberadaan individu pada satu lokasi kerja tertentu. Oleh karena itu, keterbatasan kehadiran fisik Babinsa perlu dipahami dalam konteks beban tugas kewilayahan yang lebih luas.

Dampak Interpersonal

Pada aspek dampak interpersonal, Babinsa Desa Lambara berhasil membangun hubungan kerja yang baik dengan pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, dan unsur keamanan lainnya. Hubungan koordinatif tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bernardin & Russell (1993) menjelaskan bahwa dampak interpersonal berkaitan dengan kemampuan individu membangun kerja sama, komunikasi, dan hubungan positif dengan pihak lain. Hubungan yang harmonis antaraktor keamanan desa menunjukkan adanya kemampuan Babinsa dalam membangun kepercayaan sosial.

Namun demikian, keterbatasan interaksi langsung dengan masyarakat umum masih menjadi tantangan. Frekuensi kehadiran fisik yang tidak selalu rutin menyebabkan komunikasi personal dengan seluruh kelompok masyarakat belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, penguatan pendekatan sosial secara lebih luas diperlukan agar fungsi pembinaan masyarakat dapat berjalan secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi berada pada kategori cukup baik.

Babinsa menunjukkan kinerja yang positif pada aspek kualitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas penggunaan sumber daya, dan kemampuan membangun hubungan kerja dengan berbagai pihak. Babinsa mampu merespons persoalan masyarakat secara cepat, menjalankan koordinasi dengan pemerintah desa, serta memanfaatkan dukungan Linmas dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada indikator kuantitas kerja, kehadiran, dan dampak interpersonal. Keterbatasan kehadiran fisik secara rutin akibat beban tugas kewilayahan lainnya berdampak pada belum maksimalnya keterlibatan Babinsa dalam kegiatan sosial masyarakat serta interaksi langsung dengan seluruh lapisan warga.

Dengan demikian, peningkatan efektivitas kinerja Babinsa tidak hanya membutuhkan penguatan kapasitas internal, tetapi juga strategi pengelolaan tugas dan pola komunikasi sosial yang lebih intensif dengan masyarakat desa.

REFERENSI

Andrews, R., Boyne, G. A., & Walker, R. M. (2006). Strategy content and organizational performance: An empirical analysis. *Public Administration Review*, 66(1), 52–63.

- Bernardin, H. J., & Russell, J. E. A. (1993). *Human Resource Management: An Experiential Approach*. McGraw-Hill.
- Brewer, G. A., & Selden, S. C. (2000). Why elephants gallop: Assessing and predicting organizational performance in federal agencies. *Public Administration Review*, 60(5), 409–419.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2014). *Organizations: Behavior, Structure, Processes* (14th ed.). McGraw-Hill.
- Kim, S. (2005). Individual-level factors and organizational performance in government organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15(2), 245–261.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2006). *Human Resource Management* (11th ed.). Thomson South-Western.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moynihan, D. P., & Pandey, S. K. (2005). Testing how management matters in an era of government by performance management. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15(3), 421–439.
- Mustafa. (2008). *Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Saputra, A. (2003). *Pembinaan Teritorial dalam Perspektif TNI AD*. Balai Pustaka.
- Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja* (Edisi ke-5). Rajawali Pers.